

**ABSTRAK**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penjelasan Pasal 38 UU KUP bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pada penjelasan pasal ini ternyata tidak menggunakan istilah setiap orang melainkan wajib pajak yang maknanya sangat luas. Yaitu meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak korporasi. Apabila penjelasan ini diartikan sebagai interpretasi pembuat undang-undang, maka jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini maksudnya adalah wajib pajak yang berarti bisa wajib pajak korporasi atau wajib pajak orang pribadi. Secara logika, delik pajak sebagaimana dirumuskan di dalam UU KUP ini tentu saja dapat dilakukan oleh wajib pajak korporasi sebagai pemegang hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Karena itu, adalah tidak masuk akal apabila rumusan delik itu diinterpretasikan bahwa hanya wajib pajak orang pribadi saja yang dicakup dalam rumusan delik itu.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa dalam hal pertanggungjawaban korporasi yang perlu diperhatikan pada prinsip pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di bidang perpajakan sebagai pelaku adalah individu maupun korporasi, pada tindak pidana perpajakan sering dijumpai bahwa pelaku kejahatan adalah korporasi, untuk meminta pertanggungjawaban kejahatan di bidang perpajakan diperlukan kerangka hukum yang dapat mengidentifikasi kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Kemungkinan tersebut adalah hanya orang (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana dan diminta pertanggungjawaban, orang dan/atau korporasi dapat melakukan tindak pidana; dalam hal korporasi sebagai pelakunya, maka penguruslah yang diminta pertanggungjawaban pidana, orang dan /atau korporasi dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan mengenai pertanggungjawaban korporasi ini maka ditemukan 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Perpajakan

**ABSTRACT**

Legal research is a process to determine the rule of law, principles of law and legal doctrines in order to address the legal issues at hand. This type of research used in this study using a type of normative juridical (legal research). Method of approach to the problem that used in the preparation of this thesis, namely the approach of law (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach) and the approach of the case (case approach).

Elucidation of Article 38 of Law KUP that violations of tax obligations that have been carried out by the taxpayer, insofar as it concerns tax administration measures, subject to administrative sanctions by issuing a tax assessment or KUP, while involving criminal offenses in the area of taxation subject to criminal sanctions. Thus, the explanation of this article did not use the term everyone but taxpayers whose meaning is so broad. That includes the individual taxpayers and corporate taxpayers. If this explanation is defined as the interpretation of the legislator, it is clear that what is meant by each person here means the taxpayer means the taxpayer could be a corporation or an individual taxpayer. Logically, a tax offense as defined in the Act KUP it certainly can be done by the taxpayer corporation as the holder of rights and obligations in the field of taxation. Therefore, it is not unthinkable that the formulation of the offense was interpreted that only individual taxpayers are covered in the formulation of the offense.

Based on the findings, it seemed that in terms of corporate responsibility to consider the principle of accountability of perpetrators of criminal acts in the area of taxation as the perpetrators are individuals and corporations, the tax crime is often found that the offender is a corporation, to hold the crimes in the field of taxation necessary legal framework to identify possible criminal liability. The possibility is just the (private nature) to commit a crime and be held accountable, person and / or corporation can commit criminal acts; in terms of the corporation as the culprit, then caretaker requested criminal liability, persons and / or corporations can be held accountable for criminal acts does. With the responsibility of corporations is then found three (3) models of corporate criminal liability, the board of the corporation as a manufacturer and caretaker responsible, corporations as makers and administrators responsible.

**Keywords:** Corporate Responsibility, Tax Crime